



LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta Malili Kode Pos 92981
Email: sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

1. Neraca;
2. Laporan Relalisasi Anggaran (LRA);
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2024

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang isinya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Malili, Maret 2025

PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. H. BAHRI SULI, MM
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP : 19660620 198603 1 007

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Daerah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasi (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Malili, Maret 2025
PENGUNA ANGGARAN ,

Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19660620 198603 1 007

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Laporan Realisasi Anggaran	
Neraca	
Laporan Operasional (LO)	
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	
Ringkasan Laporan Keuangan	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
Bab II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	5
A. Kebijakan Keuangan	5
B. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	5
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	7
A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	7
B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	12
Bab IV Kebijakan Akuntansi	13
A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	13
B. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	13
C. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah	14

Bab V	Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan	17
	A. Pejelasan atas Laporan Realisasi Anggaran.....	17
	1. Pendapatan	17
	2. Belanja	17
	B. Penjelasan Atas Pos – Pos Neraca	21
	1. Aset Lancar	21
	2. Aset Tetap.....	31
	3. Aset Lainnya	42
	4. Kewajiban	44
	C. Penjelasan atas Laporan Operasional	46
	D. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas	57
Bab VI	Penutup.....	59

Lampiran

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024. CaLK dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi Laporan Keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, Laporan Keuangan dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp68.163.192.933,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp7.987.500,00,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp64.712.959.836 nilai tersebut merupakan nilai setelah dilakukan pengurangan dari jumlah penyusutan sebesar Rp(47.916.765.938,00) dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.500.979.258,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas disajikan sebesar Rp67.953.032.267,- yang terdiri dari: Nilai Kewajiban

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada TA.2024 sebesar Rp188.889.950,00 atau mencapai 120,17 % dari jumlah yang ditargetkan Rp157.189.950,00 dan Realisasi Belanja pada TA.2024 adalah sebesar Rp71.072.253.285,96 atau mencapai 89,36% dari alokasi anggaran sebesar Rp79.534.615.984,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur antara lain adalah Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, sehingga menghasilkan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp188.560.458,33 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp69.703.293.339,79

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar **Rp(17.325.351.136,84)** dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(69.514.732.881,46) sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp(10.954.293.133,27).**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Untuk memenuhi Laporan tersebut, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Selanjutnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan yang telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini dihasilkan melalui serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Sekretariat Daerah. Sistem akuntansi terkomputerisasi menggunakan aplikasi **SIPD** yang dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

Pelaporan keuangan SKPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran LRA, Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Kebijakan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2023 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 juga dipengaruhi oleh kebijakan keuangan pemerintah. Adanya kebijakan keuangan dapat tergambar pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah. Besarnya anggaran pokok tahun 2024 sebesar **Rp66.689.405.984,00** dan perubahan Anggaran yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD tahun anggaran 2024 sebesar **Rp79.534.615.984,00** Kebijakan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mendukung visi SKPD yaitu terwujudnya tata kelolah administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

A. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Total Anggaran Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah sebesar **Rp79.534.615.984,00** yang terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dari anggaran yang tersedia telah direalisasikan sebesar Rp71.072.253.285,96 atau mencapai 89,36% dari total anggaran tahun 2024, yang terdiri dari Realisasi Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp69.395.699.311,79 atau sebesar 90,12 sedangkan Realisasi Anggaran Belanja Modal sebesar **Rp1.677.193.974,17** atau sebesar 66,15% dari total anggaran Belanja Modal sebesar **Rp2.535.417.788,00**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

IKTISAR REALISASI CAPAIAN KINERJA

U R A I A N		ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
1		2	3	
BELANJA		79.534.615.984,00	71.072.253.285,96	89,36
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		32.103.020.197,00	26.999.610.102,08	95,66
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		182.796.500,00	156.246.515,00	91,26
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.786.000,00	50.165.315,00	93,95
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Perencana)	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	305.000,00	188.700,00	61,87
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	823.000,00	753.690,00	91,58
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.250.000,00	1.600.000,00	91,43
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.218.000,00	2.153.400,00	97,09
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	2.600.000,00	100,00

U R A I A N			ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
7 Belanja Perjalanan Dinas Biasa			42.040.000,00	33.869.525,00	92,29
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		8.523.500,00	7.393.620,00	91,02
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	519.000,00	397.380,00	76,57
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	859.500,00	781.440,00	90,92
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.435.000,00	1.950.000,00	80,08
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.910.000,00	1.864.800,00	97,63
5		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.400.000,00	100,00
6		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		6.750.000,00	5.575.020,00	82,59
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	603.000,00	460.140,00	76,31
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	504.000,00	475.080,00	94,26
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.810.000,00	2.870.000,00	75,33
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.833.000,00	1.769.800,00	96,55
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		107.737.000,00	93.112.560,00	90,46
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	266.000,00	266.000,00	100,00
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	1.465.000,00	1.203.960,00	82,18
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.295.000,00	1.759.460,00	76,66
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.531.000,00	1.457.800,00	95,22
5		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.610.000,00	23.900.000,00	82,96
6		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68.570.000,00	64.525.340,00	94,10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.485.986.951,00	11.678.202.146,00	94,12
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		267.230.000,00	174.811.994,00	92,51
1		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	95.430.000,00	95.430.000,00	100,00
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	790.000,00	683.000,00	86,46
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	1.226.000,00	1.026.000,00	83,69
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.456.000,00	1.219.484,00	83,76
5		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.418.000,00	1.165.000,00	82,16
6		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.260.000,00	6.000.000,00	130,43
7		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.600.000,00	0,00	#DIV/0!
8		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	#DIV/0!
9		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	154.050.000,00	69.288.510,00	82,44

U R A I A N			ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		63.250.300,00	56.506.706,00	89,34
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	1.076.000,00	916.400,00	85,17
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	2.099.000,00	1.788.100,00	85,19
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.501.300,00	4.495.906,00	99,88
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.944.000,00	2.736.800,00	69,39
6		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.630.000,00	46.569.500,00	90,20
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12.155.506.651,00	11.446.883.446,00	94,17
1		Belanja Gaji Pokok PNS	4.441.368.525,00	4.252.967.486,00	95,76
2		Belanja Gaji Pokok PPPK	207.851.000,00	179.401.600,00	86,31
3		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	446.217.002,00	397.044.114,00	88,98
4		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	13.418.006,00	10.765.088,00	80,23
5		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	388.160.108,00	380.885.000,00	98,13
6		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	564.234.020,00	541.552.000,00	95,98
7		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	92.250.004,00	85.605.000,00	92,80
8		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.270.000,00	9.620.000,00	85,36
9		Belanja Tunjangan Beras PNS	242.027.800,00	224.936.520,00	92,94
10		Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.385.642,00	8.111.040,00	86,42
11		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	79.193.590,00	48.318.840,00	61,01
12		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan PPPK	12.180,00	44,00	0,36
13		Belanja Pembulatan Gaji PNS	85.834,00	60.543,00	70,53
14		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.940,00	2.408,00	81,90
15		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	5.201.840.000,00	4.886.558.893,00	93,94
16		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	76.320.000,00	75.282.370,00	98,64
17		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	257.040.000,00	221.460.000,00	86,16
18		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	4.830.000,00	4.312.500,00	89,29
19		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			91.773.200,00	85.719.770,00	93,40
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		91.773.200,00	85.719.770,00	93,40
1		Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan	22.800.000,00	22.800.000,00	100,00
2		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	245.000,00	0,00	0,00

U R A I A N			ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	753.000,00	638.000,00	84,73
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	1.148.500,00	979.500,00	85,29
5		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.414.700,00	951.700,00	67,27
6		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.302.000,00	1.113.000,00	85,48
7		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
8		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.710.000,00	57.837.570,00	92,23
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			31.970.000,00	30.139.700,00	104,65
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		31.970.000,00	30.139.700,00	104,65
1		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.080.000,00	4.080.000,00	100,00
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	289.000,00	254.300,00	87,99
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	413.000,00	349.400,00	84,60
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.400.000,00	1.200.000,00	133,33
5		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.078.000,00	860.000,00	79,78
6		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.710.000,00	23.396.000,00	106,15
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			379.758.575,00	336.358.330,00	187,94
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		79.268.575,00	71.730.575,00	107,68
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	328.575,00	309.575,00	100,00
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	540.000,00	536.500,00	100,00
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	220.000,00	220.000,00	100,00
5		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	6.000.000,00	120,00
6		Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	35.000.000,00	30.000.000,00	100,00
7		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.180.000,00	32.664.500,00	114,43
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		116.260.000,00	88.032.661,00	1.001,51
1		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00	4.400.000,00	#DIV/0!
2		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.080.000,00	540.000,00	#DIV/0!
3		Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator. Pembawa Acara. dan Panitia	8.000.000,00	8.000.000,00	#DIV/0!
4		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	#DIV/0!

U R A I A N			ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
5		Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	#DIV/0!
6		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	87.180.000,00	75.092.661,00	854,30
3		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	184.230.000,00	176.595.094,00	170,51
1		Belanja Bimbingan Teknis	115.000.000,00	115.000.000,00	176,92
2		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69.230.000,00	61.595.094,00	159,69
Administrasi Umum Perangkat daerah			3.756.989.005,00	3.451.101.019,00	104,26
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78.995.000,00	70.058.550,00	94,18
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat alistik	68.995.000,00	68.958.750,00	104,02
2		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.000.000,00	1.099.800,00	13,58
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.450.000,00	129.050.000,00	92,54
1		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	25.250.000,00	22.250.000,00	100,00
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata (<i>plakat</i>)	65.000.000,00	54.600.000,00	84,00
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (<i>Kain Bendera. Umbul-Umbul dan Taplak Meja</i>)	35.200.000,00	35.200.000,00	100,00
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	445.840.000,00	406.694.250,00	96,64
1		Belanja Bahan-Bahan Lainnya (<i>Bedcover Mess & Rujab</i>)	128.840.000,00	121.040.000,00	93,95
2		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use, Springbed, meja Makan rujab,Karpet Mess, Gorden Rujab Wabup</i>)	317.000.000,00	285.654.250,00	97,83
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	411.454.205,00	279.085.700,00	100,02
1		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	148.700.000,00	148.500.000,00	107,07
2		Belanja Bahan-Bahan Lainnya (<i>Alat Kebersihan</i>)	38.952.540,00	38.952.500,00	100,00
3		Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Lainnya	2.220.000,00	315.000,00	23,95
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	12.210.185,00	11.613.200,00	100,88
5		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	18.012.480,00	17.991.000,00	99,88
6		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.360.000,00	996.000,00	29,64
7		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	1.965.000,00	98,25
8		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	32.867.000,00	32.356.000,00	98,45
9		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum. (Jasa Dekorasi)	64.632.000,00	0,00	#DIV/0!

U R A I A N		ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
10	Belanja Jasa Tata Rias (<i>Dekorasi Kantor</i>)	30.000.000,00	0,00	#DIV/0!
11	Belanja Sewa Mebel	16.500.000,00	10.000.000,00	100,00
12	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	20.000.000,00	4.397.000,00	52,49
13	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya (<i>Tenda Terowongan</i>)	22.000.000,00	12.000.000,00	86,21
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.570.000,00	36.330.150,00	100,73
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	53.570.000,00	36.330.150,00	100,73
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00
1	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	567.025.000,00	566.762.621,00	99,95
1	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	567.025.000,00	566.762.621,00	99,95
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.847.654.800,00	1.753.119.748,00	110,73
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.000.000,00	19.250.000,00	87,50
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.825.654.800,00	1.733.869.748,00	111,06
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.216.417.788,00	1.391.539.724,17	221,50
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	466.600.000,00	451.300.000,00	#DIV/0!
1	Belanja Modal Kendaraan dinas Operasional	466.600.000,00	451.300.000,00	#DIV/0!
2	Pengadaan Meubel	249.000.000,00	165.731.000,00	#DIV/0!
1	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	8.000.000,00	0,00	#DIV/0!
2	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	35.000.000,00	0,00	#DIV/0!
3	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	7.000.000,00	0,00	#DIV/0!
4	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat (<i>Kursi Rapat</i>)	87.750.000,00	66.500.000,00	#DIV/0!
5	Belanja Modal kursi Tamu di Ruangannya Pejabat (<i>Sofa Kantor Bupati</i>)	111.250.000,00	99.231.000,00	#DIV/0!
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	763.317.788,00	358.920.000,00	181,07
1	Belanja Modal Alat Pendingin (<i>AC dan Kulkas Mess makassar, Rujab Bup, rujab Wabup dan Kantor Bupati</i>)	286.275.000,00	49.000.000,00	181,48
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>) (<i>Dispenser</i>)	20.000.000,00	0,00	#DIV/0!
3	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (<i>Kamera Zoom Meeting</i>)	206.162.788,00	143.500.000,00	100,00
4	Belanja Modal Personal Computer (<i>Laptop, Notebook/IPAD</i>)	222.500.000,00	143.370.000,00	586,98

U R A I A N			ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
5		Belanja Modal Peralatan Personal Computer (<i>Printer</i>)	28.380.000,00	23.050.000,00	698,48
3		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	737.500.000,00	415.588.724,17	96,65
1		Belanja Modal Bangunan Gudang	157.500.000,00	0,00	#DIV/0!
2		Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	218.000.000,00	210.732.041,47	96,67
3		Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	212.000.000,00	204.856.682,70	96,63
4		Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	150.000.000,00	0,00	#DIV/0!
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.809.858.684,00	1.409.115.883,00	91,64
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.058.684,00	8.451.884,00	108,33
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.367.684,00	1.366.884,00	100,00
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.241.000,00	2.235.000,00	100,00
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.350.000,00	2.350.000,00	138,24
5		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000,00	0,00	#DIV/0!
6		Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	0,00	#DIV/0!
2		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	1.038.800.000,00	876.663.999,00	84,39
1		Belanja Tagihan Telepon	10.800.000,00	9.372.123,00	86,78
2		Belanja Tagihan Air	90.000.000,00	43.015.330,00	47,79
3		Belanja Tagihan Listrik	900.000.000,00	804.024.641,00	89,34
4		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	38.000.000,00	20.251.905,00	53,29
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	750.000.000,00	524.000.000,00	106,72
1		Belanja Jasa Tenaga Administrasi (<i>Pengolah data 14 org</i>)	168.000.000,00	72.000.000,00	104,35
2		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (CS kantor. Supir Ktr. Tenaga Listrik. Operasional Lapangan. Operator alat studio. Supir Mess)	48.000.000,00	17.000.000,00	100,00
3		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	150.000.000,00	135.000.000,00	105,88
4		Belanja Jasa Tenaga Supir	360.000.000,00	300.000.000,00	108,11
5		Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	24.000.000,00	0,00	#DIV/0!
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.648.995.000,00	1.478.261.941,91	60,06
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	923.060.000,00	587.394.424,00	67,15

U R A I A N			ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
1		Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	200.000.000,00	0,00	0,00
2		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	668.500.000,00	554.163.124,00	86,90
3		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua	10.000.000,00	5.057.500,00	54,05
4		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.560.000,00	28.173.800,00	101,79
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Dinas Operasional Lapangan	46.500.000,00	27.079.000,00	70,89
1		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	31.000.000,00	11.594.000,00	51,08
2		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	15.500.000,00	15.485.000,00	99,90
3		Pemeliharaan Meubel	97.820.000,00	24.425.000,00	32,82
	1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Meubel (Refarasi Kursi Futura. Sofa dan Meja Kerja)	97.820.000,00	24.425.000,00	32,82
4		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	261.490.000,00	108.670.700,00	70,58
1		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	49.590.000,00	32.265.000,00	86,97
2		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	124.400.000,00	53.108.700,00	67,31
3		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	87.500.000,00	23.297.000,00	61,35
5		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.320.125.000,00	730.692.817,91	55,35
1		Belanja Pemeliharaan Bangunan gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	402.625.000,00	317.492.791,91	78,86
2		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Fasilitas Umum	95.000.000,00	17.505.000,00	18,43
3		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	670.000.000,00	330.729.000,00	49,36
4		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	62.500.000,00	8.317.000,00	13,31
5		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	90.000.000,00	56.649.026,00	62,94
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala daerah dan Wakil Daerah			4.323.582.394,00	3.465.087.698,00	97,69
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	791.956.394,00	703.570.772,00	107,83
1		Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.915.002,00	46.800.000,00	100,00
2		Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.114.400,00	5.544.000,00	100,00
3		Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	113.022.000,00	84.240.000,00	100,00
4		Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.533.918,00	5.214.240,00	109,09
5		Belanja Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.368.652,00	1.771.772,00	154,98

U R A I A N			ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
6		Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.422,00	760,00	122,58
7		Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	560.000.000,00	109,80
2		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	77.000.000,00	74.700.000,00	97,01
1		Belanja Pakaian Dinas KDH/WKDH	77.000.000,00	74.700.000,00	97,01
3		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000,00	0,00	0,00
1		Belanja Medical Check Up	60.000.000,00	0,00	0,00
4		Penyediaan Dana Penunjang Operasioanal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.394.626.000,00	2.686.816.926,00	97,43
1		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	28.930.000,00	28.811.022,00	99,59
2		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	48.000.000,00	10.000.000,00	58,82
3		Belanja Jasa Tenaga Supir	72.000.000,00	72.000.000,00	109,09
4		Belanja Bimbingan Teknis	200.000.000,00	0,00	#DIV/0!
5		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.645.696.000,00	2.576.005.904,00	97,37
6		Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	400.000.000,00	0,00	#DIV/0!
Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah			1.767.600.000,00	1.515.472.072,00	89,92
1		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	860.000.000,00	754.350.000,00	96,71
1		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	635.000.000,00	633.100.000,00	114,07
2		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	225.000.000,00	121.250.000,00	53,89
2		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	506.742.000,00	84,46
1		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	510.000.000,00	430.000.000,00	84,31
2		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	90.000.000,00	76.742.000,00	85,27
3		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	307.600.000,00	254.380.072,00	83,28
1		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	58.000.000,00	58.000.000,00	100,00
2		Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman. Ketertiban Umum. dan Perlindungan Masyarakat	87.600.000,00	58.560.000,00	66,85
3		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (3 orang Jkt. 3 org Mks. 2 Sekda)	35.250.000,00	32.177.400,00	91,28
4		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	101.250.000,00	85.000.000,00	83,95
5		Belanja Jasa Pengolahan Sampah	12.000.000,00	9.300.000,00	77,50
6		Belanja Pembayaran Pajak. Bea dan Perizinan	13.500.000,00	11.342.672,00	100,00
Penataan Organisasi			1.117.305.600,00	1.078.077.582,00	99,52
1		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	311.183.100,00	308.679.249,00	99,56

U R A I A N			ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	968.500,00	968.500,00	100,00
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.894.600,00	7.823.400,00	99,10
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	#DIV/0!
4		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.700.000,00	27.700.000,00	100,00
5		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.430.000,00	2.430.000,00	100,00
6		Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator. Pembawa Acara dan Panitia	51.000.000,00	50.400.000,00	100,00
8		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.240.000,00	2.000.000,00	100,00
9		Belanja Sewa Hotel	3.600.000,00	3.300.000,00	100,00
11		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	215.350.000,00	214.057.349,00	99,40
2		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	171.025.500,00	160.584.921,00	100,46
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.146.500,00	1.009.500,00	88,05
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.350.000,00	1.210.000,00	89,63
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.500.000,00	12.000.000,00	96,00
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.200.000,00	20.200.000,00	100,00
5		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.490.000,00	21.400.000,00	99,58
6		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.215.000,00	1.215.000,00	100,00
7		Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator. Pembawa Acara dan Panitia	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
8		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	#DIV/0!
9		Belanja Sewa Kapal Terbang	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
10		Belanja Sewa Hotel	1.674.000,00	1.500.000,00	100,00
11		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80.850.000,00	71.450.421,00	102,29
3		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	226.531.000,00	206.872.012,00	99,72
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	739.000,00	726.000,00	98,24
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.000.000,00	1.545.000,00	100,00
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	300.000,00	0,00	0,00
4		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00
6		Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator. Pembawa Acara dan Panitia	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00
7		Belanja Sewa Kapal Terbang	8.600.000,00	7.973.612,00	100,00
8		Belanja Sewa Hotel	2.232.000,00	2.232.000,00	100,00
9		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133.580.000,00	115.315.400,00	99,77
4		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	106.236.500,00	100.345.812,00	96,27
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.096.500,00	1.066.000,00	97,22
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.090.000,00	600.000,00	19,42

U R A I A N			ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	#DIV/0!
4		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00
5		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	#DIV/0!
6		Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator. Pembawa Acara dan Panitia	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
7		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
8		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	#DIV/0!
9		Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	#DIV/0!
10		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58.550.000,00	55.179.812,00	97,58
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	302.329.500,00	301.595.588,00	99,96
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	555.500,00	555.500,00	100,00
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.575.000,00	6.575.000,00	100,00
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	800.000,00	800.000,00	100,00
4		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.600.000,00	69.600.000,00	100,00
5		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.395.000,00	1.395.000,00	100,00
6		Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator. Pembawa Acara dan Panitia	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00
7		Belanja Sewa Kapal Terbang	12.900.000,00	12.788.300,00	100,00
8		Belanja Sewa Hotel	4.464.000,00	3.950.000,00	100,00
9		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	143.040.000,00	142.931.788,00	99,92
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			1.289.986.500,00	924.287.721,00	84,64
1		Fasilitasi Keprotokolan	621.025.500,00	353.164.482,00	74,51
1		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	121.068.000,00	20.000.000,00	29,86
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	2.053.000,00	1.490.000,00	99,59
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.474.500,00	885.000,00	100,85
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.340.000,00	770.000,00	100,00
5		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	60.000.000,00	46.500.000,00	77,50
6		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	112.080.000,00	39.930.000,00	57,04
7		BelanjaJasa Tenaga Supir	18.000.000,00	16.500.000,00	91,67
8,1		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	305.010.000,00	227.089.482,00	88,76
8,2		Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pengawasan		0,00	#DIV/0!
2		Fasilitas Komunikasi Pimpinan	125.989.000,00	90.128.268,00	75,19
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	239.000,00	0,00	0,00

U R A I A N			ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	300.000,00	0,00	0,00
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	46.250.000,00	20.000.000,00	43,70
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	480.000,00	0,00	0,00
5		Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	#DIV/0!
6		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.720.000,00	70.128.268,00	95,51
3		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	542.972.000,00	480.994.971,00	96,55
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	1.969.000,00	1.523.000,00	126,92
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.617.500,00	1.474.000,00	98,27
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	179.855.500,00	143.450.000,00	91,60
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.930.000,00	880.000,00	110,00
5		Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	48.000.000,00	48.000.000,00	106,67
6		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	309.600.000,00	285.667.971,00	97,47
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			44.546.696.900,00	41.539.620.425,00	93,25
Administrasi Tata Pemerintahan			469.349.000,00	363.809.333,00	77,51
1		Penataan/Administrasi Pemerintahan	117.612.000,00	107.407.371,00	91,32
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	847.000,00	697.000,00	82,29
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.245.000,00	1.135.700,00	91,22
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.617.000,00	1.530.000,00	94,62
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.163.000,00	1.059.300,00	91,08
5		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	11.700.000,00	97,50
6		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
7		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	88.740.000,00	79.285.371,00	89,35
2		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	148.513.000,00	111.435.400,00	90,05
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	665.000,00	652.400,00	98,11
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.253.000,00	1.199.800,00	95,75
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	16.050.000,00	5.900.000,00	54,13
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	375.000,00	344.700,00	91,92
5		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.010.000,00	21.354.500,00	74,10
6		Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator. Pembawa Acara. dan Panitia	20.000.000,00	17.000.000,00	85,00
7		Belanja Sewa Kendaraan bermotor Penumpang	1.600.000,00	0,00	#DIV/0!

U R A I A N			ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
8		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.560.000,00	64.984.000,00	105,25
3		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	203.224.000,00	144.966.562,00	95,78
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	545.000,00	531.100,00	97,45
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.216.000,00	1.141.300,00	93,86
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.220.000,00	5.115.000,00	97,99
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.293.000,00	1.202.300,00	92,99
5		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.800.000,00	3.937.500,00	72,54
6		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.740.000,00	1.100.000,00	100,00
7		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	16.000.000,00	0,00	#DIV/0!
8		Belanja Jasa Iklan/Reklame. Film. dan Pemetretan	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
9		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.400.000,00	0,00	#DIV/0!
10		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	0,00	#DIV/0!
11	9	Belanja Sewa Hotel	5.850.000,00	1.800.000,00	100,00
12	#	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	111.160.000,00	98.139.362,00	95,51
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			43.136.850.400,00	40.489.307.741,00	94,54
1		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	22.841.710.700,00	22.038.954.450,00	97,46
1		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.910.000,00	8.000.000,00	100,00
2		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	189.200.000,00	177.320.000,00	100,00
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	7.735.000,00	3.846.000,00	76,92
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6.414.500,00	2.360.000,00	59,00
5		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	45.096.200,00	19.060.000,00	95,30
6		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.435.000,00	3.600.000,00	72,00
7		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.740.000,00	69.650.000,00	99,50
8		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	116.600.000,00	105.050.000,00	95,46
9		Belanja Pakaian Jas/Safari	224.400.000,00	190.500.000,00	84,89
10		Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator. Pembawa Acara. dan Panitia	97.050.000,00	85.850.000,00	88,46
11		Honorarium Rohaniawan	843.100.000,00	755.200.000,00	89,57
12		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	32.440.000,00	32.000.000,00	100,00
13		Belanja Jasa Tenaga Supir	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
14		Belanja Jasa Tata Rias	30.000.000,00	0,00	#DIV/0!
15		Belanja Jasa Pengukuran Tanah Sertifikat Rumah Ibadah	0,00	0,00	#DIV/0!
16		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	174.200.000,00	164.400.000,00	100,00
17		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00
18		Belanja Sewa Kapal Terbang	35.100.000,00	10.783.800,00	100,00

U R A I A N			ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
19		Belanja Sewa Mebel	15.000.000,00	8.000.000,00	100,00
20		Belanja Sewa Peralatan Alat Studio Audio	30.000.000,00	20.000.000,00	100,00
21		Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya	80.000.000,00	18.000.000,00	100,00
22		Belanja Sewa Hotel/Penginapan	13.950.000,00	7.400.000,00	100,00
23		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	267.540.000,00	267.134.650,00	100,00
24		Belanja Hadiah yang Bersifat Pe Perlombaan	101.800.000,00	101.800.000,00	100,00
25		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (<i>Lembaga Ibadah</i>)	4.450.000.000,00	4.130.000.000,00	92,81
26		Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (Rumah Ibadah)	15.935.000.000,00	15.825.000.000,00	99,31
2		Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.787.352.300,00	1.138.955.280,00	64,87
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	1.706.800,00	812.000,00	47,57
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.931.500,00	646.000,00	33,45
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.264.000,00	1.764.000,00	54,04
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.610.000,00	1.200.000,00	40,00
5		Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11.000.000,00	1.750.000,00	100,00
6		Belanja Jasa tenaga administrasi	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00
7		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	220.840.000,00	124.783.280,00	62,39
8		Belanja Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan kepada Individu	1.528.000.000,00	992.000.000,00	64,92
3		Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	18.507.787.400,00	17.311.398.011,00	93,77
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	2.313.800,00	632.000,00	42,13
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.160.000,00	1.000.000,00	76,92
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.348.600,00	2.950.000,00	59,00
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.635.000,00	4.000.000,00	100,00
5		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.550.000,00	2.100.000,00	100,00
6		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	33.040.000,00	11.000.000,00	100,00
7		Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator. Pembawa acara dan panita	25.000.000,00	12.000.000,00	100,00
8		Belanja Honorarium Tim pelaksana Kegiatan	125.800.000,00	125.800.000,00	100,00
9		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	800.000,00	0,00	#DIV/0!
10		Belanja Sewa Kapal Terbang	0,00	0,00	#DIV/0!
11		Belanja Sewa Hotel	500.000,00	0,00	#DIV/0!
12		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	274.640.000,00	167.916.011,00	61,14

U R A I A N			ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
13		Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	#DIV/0!
14		Belanja Beasiswa	18.024.000.000,00	16.984.000.000,00	94,23
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			840.761.500,00	713.337.076,00	93,75
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		228.155.600,00	226.001.233,00	99,06
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	1.593.600,00	1.520.200,00	95,39
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.422.500,00	4.302.900,00	97,30
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.837.500,00	1.809.000,00	98,45
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.062.000,00	4.043.500,00	99,54
5		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	11.800.000,00	98,33
6		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
7		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	192.240.000,00	190.525.633,00	99,11
2	Fasilitasi Bantuan Hukum		443.697.500,00	351.954.753,00	88,90
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	1.937.000,00	1.907.200,00	98,46
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.765.000,00	2.635.200,00	95,31
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.409.500,00	5.338.200,00	98,68
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	550.000,00	550.000,00	100,00
5		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.726.000,00	1.656.500,00	95,97
6		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.850.000,00	5.400.000,00	90,00
7		Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	#DIV/0!
8		Belanja Honorarium Pemberi Keterangan Ahli. Saksi Ahli. dan Beracara	38.200.000,00	10.350.000,00	64,09
9		Belanja Jasa Tenaga Ahli	169.000.000,00	131.000.000,00	85,62
10		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.700.000,00	5.271.000,00	48,71
11		Belanja Sewa Kapal terbang	20.000.000,00	12.621.890,00	63,11
12		Belanja Sewa Hotel	6.000.000,00	3.696.968,00	61,62
13		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	171.560.000,00	171.527.795,00	99,98
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		168.908.400,00	135.381.090,00	98,95
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	4.259.100,00	4.189.600,00	98,37
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.922.500,00	1.896.500,00	98,65
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	48.565.800,00	47.140.400,00	99,72
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.381.000,00	2.239.500,00	94,06
5		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	3.200.000,00	100,00

U R A I A N			ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
6		Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator. Pembawa Acara. dan Panitia	20.000.000,00	0,00	#DIV/0!
7		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77.780.000,00	76.715.090,00	98,63
Fasilitasi Kerjasama Daerah			99.736.000,00	73.166.275,00	80,12
1	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri		77.556.000,00	54.249.805,00	78,46
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	270.000,00	263.700,00	97,67
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	791.000,00	666.800,00	84,30
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.050.000,00	876.200,00	83,45
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	100,00
5		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	375.000,00	329.700,00	87,92
6		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.400.000,00	13.300.000,00	99,25
7		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.170.000,00	38.313.405,00	72,62
2	Evaluasi Pelaksanaan kerja sama		22.180.000,00	18.916.470,00	85,29
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	96.000,00	69.400,00	72,29
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	604.000,00	553.600,00	91,66
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	700.000,00	618.570,00	88,37
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	250.000,00	219.800,00	87,92
5		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00	5.800.000,00	100,00
6		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.730.000,00	11.655.100,00	79,12
Program Perekonomian dan Pembangunan			2.884.898.887,00	2.537.878.642,00	93,78
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			521.424.100,00	483.404.726,00	96,09
1	Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		388.033.200,00	359.579.253,00	96,75
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	3.259.300,00	2.907.500,00	89,21
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.363.500,00	2.016.350,00	93,20
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.803.400,00	6.491.502,00	95,42
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000,00	150.000,00	100,00
5		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.957.000,00	3.432.900,00	86,76
6		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.350.000,00	26.000.000,00	100,97
7		Belanja Jasa Iklan/Reklame. Film dan Pemotretan	32.000.000,00	27.000.000,00	100,00

U R A I A N			ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
8		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	0,00	#DIV/0!
9		Belanja jasa konsultansi berorientasi layanan jasa konsultansi manajemen	150.000.000,00	146.425.980,00	100,00
10		Belanja jasa konsultansi berorientasi layanan jasa kusus	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00
11		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	136.150.000,00	135.155.021,00	99,27
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		92.085.950,00	83.356.710,00	92,53
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	1.303.000,00	1.091.800,00	83,79
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.598.500,00	1.370.800,00	85,76
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.059.450,00	2.520.810,00	82,39
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	620.000,00	609.900,00	98,37
5		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.080.000,00	12.980.000,00	99,24
		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.795.000,00	2.475.000,00	65,22
6		Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator. Pembawa Acara. dan Panitia	12.500.000,00	10.250.000,00	82,00
7		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56.130.000,00	52.058.400,00	96,17
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		41.304.950,00	40.468.763,00	97,98
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	783.500,00	659.780,00	84,21
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	723.000,00	675.990,00	93,50
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.543.450,00	2.286.378,00	89,89
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	995.000,00	954.600,00	95,94
5		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.550.000,00	3.400.000,00	95,77
6		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.710.000,00	32.492.015,00	99,33
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			150.428.640,00	115.878.060,00	88,40
1	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		59.152.450,00	42.496.644,00	77,81
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	1.231.400,00	545.490,00	100,00
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.253.000,00	1.177.710,00	93,99
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.578.050,00	727.030,00	100,00
5		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.110.000,00	839.600,00	75,64
6		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.620.000,00	2.000.000,00	55,25
7		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.360.000,00	37.206.814,00	78,56
2	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		91.276.190,00	73.381.416,00	95,97
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	1.566.540,00	1.323.460,00	84,48
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.470.000,00	444.070,00	100,00
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.464.650,00	2.378.286,00	141,85

U R A I A N			ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
5		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.685.000,00	1.265.400,00	75,10
6		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.960.000,00	13.495.000,00	96,67
7		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69.130.000,00	54.475.200,00	95,35
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			2.083.245.847,00	1.863.886.606,00	94,85
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1.026.623.300,00	945.442.473,00	97,91
1		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
2		Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	768.300.000,00	722.070.000,00	99,97
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	810.800,00	810.800,00	100,00
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5.919.500,00	5.831.260,00	98,51
5		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.820.000,00	1.817.690,00	99,87
6		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	933.000,00	896.600,00	96,10
7		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.400.000,00	21.280.000,00	99,44
8		Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
9		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	162.640.000,00	127.936.123,00	86,65
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		763.305.397,00	679.199.183,00	92,39
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	3.015.972,00	2.970.268,00	98,48
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.144.425,00	2.204.240,00	70,10
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.925.000,00	0,00	0,00
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	100,00
5		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.500.000,00	2.000.740,00	80,03
6		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.545.000,00	16.800.000,00	38,58
7		Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	990.000,00	0,00	0,00
8		Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator. Pembawa Acara. dan Panitia	24.000.000,00	0,00	0,00
9		Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	70.000.000,00	60.000.000,00	100,00
10		Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan	224.000.000,00	223.646.000,00	99,84
11		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.300.000,00	0,00	0,00
12		Belanja Sewa Komputer Jaringan (Langganan dedicated server)	216.000.000,00	216.000.000,00	100,00
13		Belanja Sewa Hotel	2.700.000,00	0,00	0,00
14		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	62.000.000,00	60.450.000,00	97,50

U R A I A N			ANGGARAN PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
15		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.685.000,00	94.627.935,00	98,08
16		Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	0,00	0,00
17		Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	-	0,00	#DIV/0!
3	Pembinaan dan Advokasi Barngdan Jasa		293.317.150,00	239.244.950,00	90,52
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	207.000,00	207.000,00	100,00
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.042.250,00	1.042.250,00	100,00
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	809.900,00	796.200,00	98,31
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	658.000,00	0,00	0,00
6		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	1.800.000,00	57,14
7		Belanja Bimbingan Teknis	100.000.000,00	99.250.000,00	99,25
8		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	187.450.000,00	136.149.500,00	85,93
Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam			129.800.300,00	74.709.250,00	69,82
1	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan pertanian. kehutanan. kelautan dan perikanan		46.685.850,00	38.428.920,00	92,19
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	978.000,00	618.900,00	63,28
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.124.500,00	1.022.800,00	90,96
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.323.350,00	1.063.720,00	80,38
5		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	800.000,00	714.100,00	89,26
6		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.830.000,00	3.050.000,00	79,63
7		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.630.000,00	31.959.400,00	95,03
2	Koordinasi. sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup		83.114.450,00	36.280.330,00	55,55
1		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor	1.767.000,00	1.186.400,00	67,14
2		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	904.500,00	859.500,00	95,02
3		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.482.950,00	1.376.630,00	92,83
4		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	230.000,00	219.800,00	95,57
5		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.200.000,00	6.900.000,00	75,00
6		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69.530.000,00	25.738.000,00	49,75

B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dapat dilihat pada kegiatan yang daya serap anggarannya dibawah 60%. Kegiatan tersebut Tabel di bawah menggambarkan anggaran dan realisasi yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Anggaran Pokok Pada Sekretariat Daerah Tahun 2024 sebesar **Rp79.534.615.984,00** dengan Realisasi **71.178.389.169,08** dengan capaian **89,48%**. yang terdiri dari Belanja Operasi **Rp76.999.198.196,00** dengan Realisasi **Rp69.512.914.242,00** dengan capaian **90,27%** dan Belanja Modal **Rp2.535.417.788,00** dengan realisasi **Rp1.665.474.927,00** dengan Capaian **65,69%**.

Salah satu kendala Penggunaan Anggaran yang kurang maksimal disebabkan beberapa belanja adalah adanya himbauan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi anggaran serta terdapat beberapa belanja yang mempunyai kendala dalam realisasi dan cukup signifikan menyisakan anggaran pada Anggaran Kas sampai Triwulan IV diantaranya sebagai berikut:

1. ***Rendahnya Persentase realisasi Gaji dan Tunjangan*** dengan persentase 94,17% disebabkan Sisa anggaran disiapkan untuk gaji pppk angkatan sebanyak 4 orang selama 2 bulan namun masih dibayarkan pada BKAD, dan lainnya disiapkan untuk kekosongan jabatan dan staf yang terdiri atas (kabag 1 org, kasubag 2, fungsional 5 org dan staf 2).
2. ***Pengadaan Meubel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, serta Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*** Tidak maksimalnya realisasi anggaran disebabkan adanya himbauan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga dilakukan penundaan.
3. ***Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum***, realisasi tidak maksimal disebabkan Tidak maksimalnya realisasi dikarenakan sisa anggaran 239.256.000, sisa anggaran tersebut merupakan anggaran belanja jasa tenaga pelayanan umum sebanyak 9 orang, tenaga sopir 1 orang, cleaning service 1 orang, operator alat studio 2 orang, tenaga listrik 2 orang yang kosong.
4. ***Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya***, Realisasi masih rendah disebabkan anggaran yang direncanakan untuk pengecatan Rumah Jabatan pagar

Rumah Jabatan Bupati dan Rumah Jabatan Wakil Kepala Daerah tidak terlaksana karena penyedia tidak menyampaikan RAB pekerjaan dimaksud sampai batas yang waktu optimalisasi pelaksanaan kegiatan.

5. ***Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***, rendahnya realisasi disebabkan Sisa Anggaran merupakan Belanja Perjalanan Dinas Luar negeri dan belum maksimal disebabkan belum adanya realisasi belanja bimtek dan perjalanan dinas luar negeri.

6. ***Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual***, rendahnya realisasi disebabkan Realisasi keuangan belum optimal disebabkan salah satu Belanja yang signifikan adalah Belanja Hibah pada Lembaga Ibadah di mana laporan LPJ penggunaan tahap pertama baru masuk pada akhir periode Triwulan sehingga pengajuan pencairan untuk tahap kedua akan dilaksanakan pada awal Triwulan ke 3. arena Honorarium Rohaniwan Kuningan, Galungan, Paskah tidak dibayarkan karena panitia pelaksanaanya tidak bermohon pembayaran karena tdk melaksanakan keg.tingkat kab. sedangkan honorarium rohaniawan kegiatan 1 Muharram jumlah yang dibayarkan tidak sebesar yang direncanakan, serta sewa ringging/sewa alat pelindung lainnya tidak teralisasi sesuai target . selain itu Sisa anggaran yang besar terdapat pada Belanja Hibah Lembaga Ibadah Rp330.000.000 dan Hibah Rumah Ibadah sebesar Rp110.000.000 merupakan pembayaran tahap 20% namun panitia belum bermohon hingga Tahun anggaran berakhir.

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dan Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, karena Penetapan Beasiswa Kurang Mampu yang mendaftar dan tervalidasi tidak sebanyak Kouta yg disediakan. Serta dapun anggaran yang masih tersisa sebesar Rp1.196.389.389,- karena Bantuan Beasiswa Berprestasi Luar Negeri tidak dilaksanakan terkendala pada Regulasi yang belum ada.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan keuangan Sekretariat Daerah hanya 1 (satu) unit yaitu SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Enti Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

B. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah lama, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
2. Basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

C. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

1. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

2. Prinsip Realisasai (*Realization Principle*)

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi sektor swasta.

3. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksud untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan, namun periode semesteran juga diperkenankan.

5. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh

dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

6. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

7. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga asset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan asset atau pendapatan yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tidak netral dan tidak andal.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Daerah adalah laporan yang menyajikan salah satu sumber keuangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yakni **Pendapatan Retribusi Daerah**, serta pemakaian sumber daya keuangan yaitu Belanja diantaranya adalah **Belanja Operasi** yang di dalamnya terdapat Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah serta **Belanja Modal** yang di dalamnya terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. LRA juga menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

1. Pendapatan

Informasi yang disajikan adalah Pendapatan yang dapat terealisasi sebesar Rp188.889.950 dari target Rp157.189.950,00,- atau 120,17% ini merupakan pendapatan daerah dari *Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah* berupa Penyewaan Tanah dan Bangunan senilai Rp52.189.950,- dan *Retribusi Penyewaan Bangunan* antara lain sewa Mess Pemda Makassar sebesar Rp95.500.000,- , sewa Mess Pemda Jakarta Rp26.200.000,- dan sewa Gedung Pertemuan senilai Rp15.000.000,00 serta *Lain-lain PAD yang sah* berupa Penerimaan atas Ganti Rugi Tanah Lokasi Perumahan PNS sebesar Rp12.600.000,00, di mana pada Tahun 2023 target atas Penerimaan tersebut masih di catat pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

2. Belanja

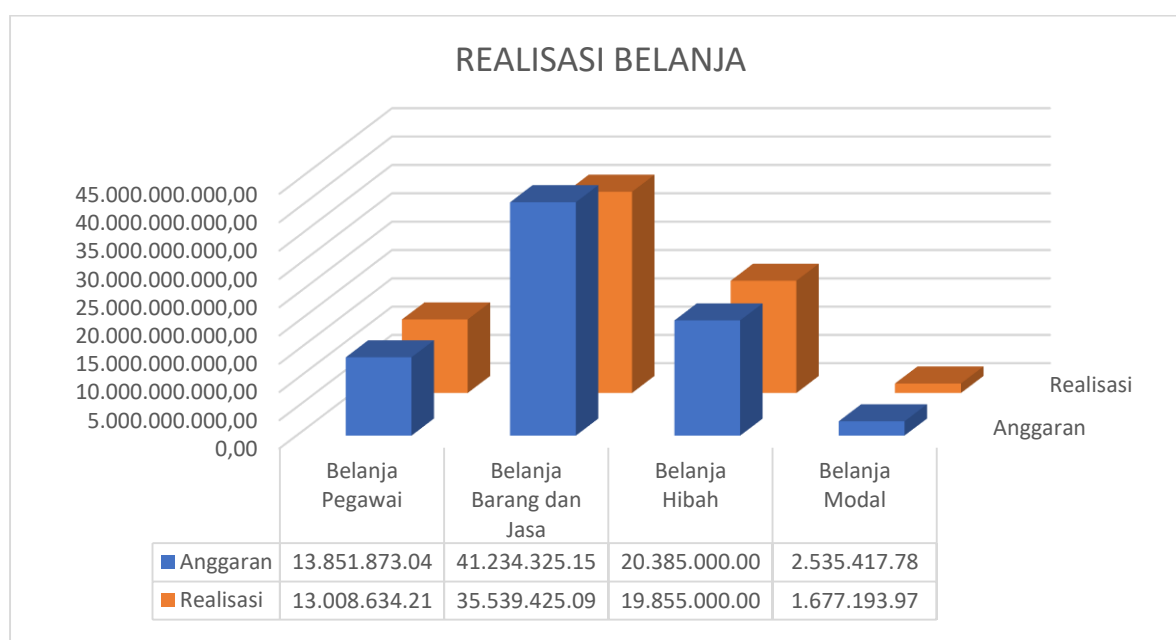
Jenis belanja yang ada di Sekretariat Daerah adalah Belanja Operasi dan Belanja Modal. **Belanja Operasi** Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar **Rp69.395.059.311,79** dari anggaran sebesar **Rp76.999.198.196** atau sebesar **90,12** yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp13.008.634.218,00 dari anggaran sebesar Rp13.851.873.045,00 atau sebesar 93,91% yang digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan 79 orang pegawai yang terdiri dari 6 orang eselon II, 9 orang eselon III, 2 orang eselon IV, dan pejabat Fungsional Penyetaraan 16 dan Fungsional Pengelolaan Barang dan Jasa 12 orang 34 staf serta digunakan untuk membayar Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah.
- b. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp35.539.425.093,79 dari anggaran sebesar Rp41.234.325.151,00 atau sebesar 86,19% digunakan untuk biaya operasional lingkup Sekretariat daerah seperti belanja rutin, perjalanan dinas dan belanja rumah tangga dan operasional Kepala Daerah;
- c. Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp19.855.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp20.385.000.000,00 atau sebesar 97,40% merupakan belanja hibah kepada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial

Kemasyarakatan yakni rumah ibadah sebanyak 103 terdiri dari 47 masjid, 31 gereja dan 13 pura.

Sedangkan **Belanja Modal** terealisasi sebesar Rp1.677.193.974,17 dari anggaran sebesar Rp2.535.417.788 atau sebesar 66,15% terdiri dari:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp1.261.605.250 dari anggaran sebesar Rp1.797.917.788 atau sebesar 70,17% dan
 - b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung terealisasi sebesar Rp415.588.724,17 dari anggaran sebesar Rp737.500.000 atau sebesar 56,35%
- Komposisi realisasi belanja dan anggaran belanja SKPD Sekretariat Daerah tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada diagram berikut ini :



Dari satu periode tahun berjalan, pada operasional kegiatan Sekretariat Daerah terdapat beberapa kesalahan dalam perhitungan biaya belanja kegiatan sehingga dilakukan pengembalian belanja ke Kas Daerah (*Contra Post*) yang dikembalikan dalam tahun berjalan

TA. 2024 sebelum akhir periode tutup buku. Rincian pengembalian dapat dilihat pada table sebagai berikut:

TABEL 5.1
DAFTAR PENGEMBALIAN BELANJA TA.2024

NO	TGL	URAIAN	STS TU	STS LS	STS BELANJA	UP
1	1 Juli 2024	Atas Pengembalian sisa TU pada kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Belanja Sewa Kapal Terbang)	626.388,00			
2	30 Mei 2024	Atas Pengembalian belanja bahan cetak Rp 100.000	5.085.000,00			
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.750.000				
		Belanja Jasa Tenaga Pengamanan Rp3.000.000				
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 235.000				
4	25 Maret 2024	Pengembalian Belanja sisa TU Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	1.183.700,00			
		Belanja sewa Kapal Terbang Rp 111.700				
		Belanja sewa Hotel Rp1.072.000				
5	18 Juli 2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	807.000,00			

NO	TGL	URAIAN	STS TU	STS LS	STS BELANJA	UP
6	19 September 2024	Pengembalian Sisa TU atas Belanja Cetak Spanduk pada sub kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Tahun 2024	309.000,00			
7	25 November 2024	Pengembalian Belanja atas Kelebihan Pembayaran Paket Pekerjaan pengecetan Pagar Rujab Wakil Bupati dengan No.Kontrak :003/pengecetan pagar II/SPK/III/Tahun 2024, CV MEGA UTAMA KARYA TA.2024	-	4.585.823,12		
8	13 Nopember 2024	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah pada sub kegiatan Penataan Admnistrasi Pemerintahan pada tgl 2 Agustus 2024 an. Andi Muh. Reza, S.STP,MA			410.000,00	
	13 Nopember 2024	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah pada sub kegiatan Penataan Admnistrasi Pemerintahan pada tgl 1 Agustus 2024 an. Andi Muh. Reza, S.STP,MA			410.000,00	
9	13 Nopember 2024	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah pada sub kegiatan Penataan Admnistrasi Pemerintahan pada tgl 1 Agustus 2024 an. Manase, SE			230.000,00	
	13 Nopember 2024	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah pada sub kegiatan Penataan Admnistrasi Pemerintahan pada tgl 2 Agustus 2024 an. Manase, SE			230.000,00	
10	4 Desember 2024	Pengembalian Belanja atas Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Uang penginapan 30%) Tahun 2024 (an.Drs. H.Bahri Suli, MM)	-		270.060,00	
11	31 Desember 2024	Pengembalian sisa UP Tahun Anggaran 2024	-			4.712.912,00
TOTAL			8.011.088,00	4.585.823,12	1.550.060,00	4.712.912,00

Pengembalian belanja tersebut telah mengurangi total belanja Sekretariat Daerah pada Rekening belanja kegiatan.

B. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024 **Nihil** atau sebesar **Rp0,00** yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Adapun sisa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp4.712.912.00 telah di kembalikan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2024 dengan nomor STS 037/STS/BP-SETDA/XII/2024.

b. Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 **Nihil** atau sebesar Rp0,00 karena telah disetor ke Kas Daerah yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain, Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

c. Beban Dibayar Di muka

Beban dibayar di muka pada Tahun 2024 sebesar Rp56.464.020 terdiri atas beban yang dibayar di muka atas pembayaran pajak STNK sebesar Rp35.057.720,83, sehingga dilakukan perhitungan sebagaimana terlihat pada tabel berikut, perhitungan Beban di bayar di muka dari pembayaran STNK Kendaraan Dinas lingkup Sekretraiat Daerah atau dapat dilihat pada lampiran

d. Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 merupakan hasil *stock opname* oleh Tim Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian diukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir. Saldo ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024, yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.987.500,00 yang terdiri atas persediaan Kertas dan Cover sebesar Rp1.792.500,00 Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp200.000,00 belanja bahan komputer sebesar Rp1.455.000,00 belanja cetak sebesar Rp1.250.000,00, belanja komponen instalasi listrik sebesar Rp3.290.000,00 Berita Acara dan Rincian terampir

2. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp64.712.959.836 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 5.4
RINCIAN ASET TETAP

NO	URAIAN	SALDO AWAL S/D 31 DES 2023	TAHUN 2024		
			BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
1	Tanah	13.759.089.379,00	0,00	0,00	13.759.089.379
2	Peralatan dan Mesin	34.271.679.437,00	3.090.572.962,97	2.514.337.896,46	34.840.514.903
3	Gedung dan Bagunan	53.876.087.414	6.162.209.197,17	0,00	60.038.296.611
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.656.209.381	0,00	0,00	3.656.209.381
5	Aset Tetap Lainnya	316.217.500	-	-	316.217.500
6	Konstruksi dalam Pekerjaan	24.898.000	-	5.500.000,00	19.398.000
7	Akumulasi Penyusutan	-47.499.767.980		-	-47.916.765.938
J U M L A H		58.404.413.131,00	9.252.782.160,14	2.519.837.896,46	64.712.959.836,00

Selama Tahun 2024 Aset Tetap mengalami penambahan dan pengurangan dengan rincian table sebagai berikut :

TABEL 5.5
TABEL PENAMBAHAN & PENGURANGAN ASET TAHUN 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL S/D 31 DES 2023	TAHUN 2024		
			BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO AKHIR
1	Tanah	13.759.089.379,00	0,00	0,00	13.759.089.379
2	Peralatan dan Mesin	34.271.679.437,00	3.090.572.962,97	2.514.337.896,46	34.840.514.903
3	Gedung dan Bangunan	53.876.087.414	6.162.209.197,17	0,00	60.038.296.611
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.656.209.381	0,00	0,00	3.656.209.381
5	Aset Tetap Lainnya	316.217.500	-	-	316.217.500
6	Konstruksi dalam Pekerjaan	24.898.000	-	5.500.000,00	19.398.000
7	Akumulasi Penyusutan	-47.499.767.980		-	-47.916.765.938
J U M L A H		58.404.413.131,00	9.252.782.160,14	2.519.837.896,46	64.712.959.836,00

Aset tetap Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

a. Tanah

Aset Tanah sampai tahun 2024 senilai 13.759.089.379 sedangkan pada tahun 2023 13.759.089.379,00 tidak mengalami kenaikan ataupun pengurangan sehingga nilai asset tanah yang tercatat pada Sekretariat Daerah masih tetap.

b. Peralatan dan Mesin

Aset Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp34.840.514.903,84 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp34.271.679.437,33 terdapat penambahan dan pengurangan seperti rincian sebagai berikut :

Sedangkan **Pengurangan** Peralatan dan Mesin Rp2.514.337.896,46 terdiri dari:

1) Mutasi ke Perpustakaan	Rp 3.845.000,-
2) Hibah Ke Yayasan Raudah Algontory	Rp 47.080.000,-
3) Reklas Ke Aset Lainnya	Rp1.064.327.150,46
4) Hibah Ke Universitas Terbuka	Rp 34.048.600,-
5) Mutasi Ke Damkar	Rp 12.048.100,-
6) Mutasi Ke Kantor DPMD	Rp 662.884.646,-
7) Hibah Ke Kantor Kejaksaan	Rp 206.000.000,-
8) Hibah ke Polres	Rp 255.400.000,-
9) Hibah Ke SD IT Malili	Rp 5.429.000,-
10) Mutasi Ke Dinas Pertanian	Rp 201.850.000,-

Sedangkan daftar penambahan pada Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

1. Mutasi dari Dinas PUPR	Rp1.828.967.712,97
2. Penambahan dari Pengadaan 2024	Rp1.261.605.250,00

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan, sampai dengan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp60.038.296.611,93 pada tahun 2023 Gedung dan Bangunan sebesar Rp53.876.087.414,76 Terdapat **Penambahan** nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Modal TA.2024 sebesar Rp415.588.724,17 terdiri Bangunan Fisik Sarana pendukung Rujab Sekda, berupa pekerjaan Pembangunan Taman Rujab Sekda dengan biaya pengawasan sebesar Rp204.856.682.070 dan pembuatan Taman Gasebo dan Kolam Ikan pada Rujab

Wakil Bupati beserta biaya pengawasan dan biaya perencanaan sebesar Rp210.732.041,47.

Penambahan yang lain yakni dari Mutasi Dinas PUPR sebesar Rp5.741.120.473 serta pengakuan asset dari konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2023 sebesar Rp5.500.000,-

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai dengan tahun 2024 senilai Rp3.656.209.381,00 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan dari Tahun 2023 sebesar Rp3.656.209.381,00. nilai tersebut tidak mengalami perubahan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp316.217.500,00 sedangkan pada tahun 2023 nilai Aset tetap Lainnya sebesar Rp316.217.500,00. Nilai ini tidak mengalami pengurangan ataupun Penambahan.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan, pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp19.398.000,00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp24.898.000,00 . Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan mengalami pengurangan sebesar Rp5.500.000,00 yang merupakan biaya perencanaan berupa Penataan Halaman Rujab Sekda.

g. Akumulasi Penyusutan

Jumlah Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp47.916.765.938,80), sedangkan tahun 2023 Akumulasi Penyusutan adalah sebesar (Rp47.499.767.980) dengan angka penambahan tahun berjalan

TABEL 5.9
AKUMULASI PENYUSUTAN

Uraian	Tahun 2023
Akumulasi Penyusutan	
Akumulasi Penyusutan Awal	(47.499.767.980,00)
Penyusutan Tahun Berjalan	(416.997.958,80)
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	(47.916.765.938,80)

3. Aset Lainnya

Aset lainnya sampai dengan Tahun 2024 senilai Rp1.500.979.258,27 dan pada tahun 2023 nilai Aset Lainnya Senilai Rp1.129.904.439,81. Rincian dapat dilihat pada table berikut:

TABEL 5.10
RINCIAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA

NO	RINCIAN BELANJA	BANYAKNYA	JUMLAH
I	Pengurangan :		
1	Mutasi ke BKAD berupa kendaraan	2 unit	656.600.000,00
2	Hibah ke Yayasan Raudah Algotory berupa Televisi	1 unit	10.000.000,00
3	Penghapusan BMD yang tidak ditemukan berupa Peralatan dan Mesin		859.215.816,50
4	Pemusnahan barang		1.734.174.128,00
5	Hibah Ke Universitas Terbuka berupa Alat kantor dan alat Rumah Tangga Lainnya (Home use)	11 unit	13.975.000,00
6	Hibah ke SD IT Malili berupa meja kerja	4 unit	7.400.000,00
			Rp3.281.364.944,50

NO	RINCIAN BELANJA	BANYAKNYA	JUMLAH
II	Penambahan :		
1	Reklas dari KIB B berupa kendaraan dan peralatan kantor		1.064.327.150,00
			Rp1.064.327.150,00

Nilai tersebut di atas merupakan nilai asset lainnya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan asset lain-lain senilai Rp(9.336.005.477,27)

4. Kewajiban

Kewajiban pada Sekretariat Daerah terdiri atas dua akun kewajiban diantaranya adalah Pendapatan diterima di muka dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pada tahun 2024 total Kewajiban sebesar Rp210.160.666,17 sedangkan pada tahun 2023 total kewajiban sebesar Rp166.989.355,00. Terdapat penambahan jumlah utang sebesar Rp47.171.311,17 yang terdiri atas pendapatan diterima di muka sebesar Rp39.370.629,17 merupakan pendapatan atas penerimaan sewa lahan untuk ATM dan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp55.779.000,00 merupakan utang retensi dan utang rekanan senilai Rp85.106.399,00. Dengan rincian tabel sebagai berikut

DAFTAR UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TAHUN 2024

NO	SUB KEGIATAN	KONTRAK	REALISASI KEUANGAN(R p) PER 31 DES 2024	REALISASI PER 31 DES 2024		SELISIH (%)	NO KONTRAK/SPK	PPK	REKANAN	UTANG RETENSI PER 31 DES 2024	UTANG REKANAN PER 31 DES 2024	KET
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)							
	Utang Retensi											
1	Penambahan Ruang pada Rumah Jabatan Bupati	74.250.000	70.537.500	100	95	5	32.A/KON-TAPEM/XI/2007 Tgl 24 Nov 2007	-	CV. SAKINAH	3.712.500		
2	Rehab Tugu Badik	49.470.000	46.997.000	100	95	5	25/SPK/TAPEM/X/2007 Tgl 08 Okt 2007	-	CV. SATRINA PUTRI	2.473.000		
3	Bangunan Kantor KPUD	264.119.600	198.089.700	100	95	5	009/KON/SET/VII/2009	-	PT.ULUDAYA KARYA	66.029.900		
4	Pembangunan Tempat Wuduh Mesjid Kantor Bupati	89.700.000	85.215.000	100	95	5	08/SPK-Pemb/IX/2012	-	CV. AMAN MANDIRI	4.485.000		
5	Rehabilitasi Asrama Putri Luwu Timur di Makassar	256.330.000	108.119.994	100	95	5	03/SP-KONTRAK/PPK-I/SETDA/VII/2015 Tgl 22 Juli 2015	-	CV.RATU LANGI	5.405.999		
	Jumlah									82.106.399		
	Utang Rekanan											
1	Pengawasan Pembangunan Tempat wuduh Mesjid Kantor Bupati	3.000.000		100				-	CV. DIAN PERDANA		3.000.000	
	Jumlah										3.000.000	
	Jumlah									85.106.399		

5. Ekuitas

Ekuitas dana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 Ekuitas dana sebesar Rp67.742.871.600,90, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 Ekuitas sebesar Rp61.547.925.663,50 dari perbandingan tersebut dapat diketahui adanya Peningkatan dari tahun anggaran 2024.

C. Penjelasan atas Laporan Operasional

Laporan operasional terdiri dari unsur pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan- LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp188.560.458,33 sedangkan jumlah beban sebesar Rp69.703.293.339,79 yang terdiri dari beban pegawai-Lo sebesar Rp13.008.634.218,00 ditambah beban Barang dan Jasa sebesar Rp35.813.610.521,79 Beban Hibah sebesar Rp19.855.000.000,00

TABEL 5.12
DAFTAR BEBAN PEGAWAI

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
8.1.01	Beban Pegawai	13.008.634.218,00	
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	4.252.967.486,00	
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	179.401.600,00	
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	397.044.114,00	
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	10.765.088,00	
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	380.885.000,00	
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	541.552.000,00	
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	85.605.000,00	
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9.620.000,00	
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	224.936.520,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	8.111.040,00	
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	48.318.840,00	
8.1.01.01.07.0002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	44,00	
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	60.543,00	
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.408,00	
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.886.558.893,00	
8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	75.282.370,00	
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	221.460.000,00	
8.1.01.02.03.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	4.312.500,00	
8.1.01.02.04.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	120.000.000,00	
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	108.510.000,00	
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.800.000,00	
8.1.01.03.07.0003	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	722.070.000,00	
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	22.800.000,00	
8.1.01.05.01.0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	46.800.000,00	
8.1.01.05.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.544.000,00	
8.1.01.05.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	84.240.000,00	
8.1.01.05.04.0001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.214.240,00	
8.1.01.05.05.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.771.772,00	
8.1.01.05.06.0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	760,00	
8.1.01.06.02.0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	560.000.000,00	
Jumlah		13.008.634.218,00	

TABEL 5.13
DAFTAR BEBAN BARANG DAN JASA

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	35.813.610.521,79	
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	176.500.000,00	
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.475.412.500,00	
8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	315.000,00	
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	47.777.377,00	
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	68.888.190,00	
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	345.685.716,00	
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.165.000,00	
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	92.447.740,00	
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	67.653.750,00	
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	22.250.000,00	
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	54.600.000,00	
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	55.400.000,00	
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	508.097.000,00	
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	723.608.643,00	
8.1.02.01.01.0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	74.700.000,00	
8.1.02.01.01.0078	Beban Pakaian Jas/Safari	190.500.000,00	
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	313.500.000,00	
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	125.800.000,00	
8.1.02.02.01.0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	10.350.000,00	
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan	755.200.000,00	
8.1.02.02.01.0017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	58.560.000,00	
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	124.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	342.769.200,00	
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	131.000.000,00	
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	220.000.000,00	
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	81.930.000,00	
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	406.500.000,00	
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	120.000.000,00	
8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	9.300.000,00	
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	59.000.000,00	
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	9.372.123,00	
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	43.015.330,00	
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	846.866.460,00	
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	210.000.000,00	
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	243.897.905,00	
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.342.672,00	
8.1.02.02.02.0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	198.788.755,00	
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	171.671.000,00	
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.000.000,00	
8.1.02.02.04.0057	Beban Sewa Kapal Terbang	49.767.602,00	
8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	18.000.000,00	
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	24.397.000,00	
8.1.02.02.04.0404	Beban Sewa Komputer Jaringan	216.000.000,00	
8.1.02.02.04.0451	Beban Sewa Alat Pelindung Lainnya	30.000.000,00	
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	23.878.968,00	
8.1.02.02.10.0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	146.425.980,00	

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
8.1.02.02.10.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	10.000.000,00	
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	214.250.000,00	
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	589.220.728,00	
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	11.594.000,00	
8.1.02.03.02.0037	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	15.485.000,00	
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.057.500,00	
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	32.265.000,00	
8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	24.425.000,00	
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	53.108.700,00	
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.297.000,00	
8.1.02.03.02.0404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	60.450.000,00	
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	317.492.791,91	
8.1.02.03.03.0032	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	17.505.000,00	
8.1.02.03.03.0038	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	326.143.176,88	
8.1.02.03.03.0039	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	8.317.000,00	
8.1.02.03.03.0041	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	56.649.026,00	
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	8.003.216.688,00	
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	101.800.000,00	
8.1.02.05.01.0003	Beban Beasiswa	16.984.000.000,00	
JUMLAH		35.813.610.521,79	

TABEL 5.13
DAFTAR BEBAN HIBAH

NO	DETAIL URAIAN PAKET PEKERJAAN KELEMBAGAAN	TOTAL REALISASI	KET
1	BAZZNAS KABUPATEN LUWU TIMUR	Rp 200.000.000	
2	BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASID INDONESIA (BKPRMI) KABUPATEN LUWU TIMUR	Rp 300.000.000	
3	KANTOR PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN LUWU TIMUR	Rp 500.000.000	
4	FORUM KERJASAMA GEREJA - GEREJA KABUPATEN LUWU TIMUR	Rp 200.000.000	
5	LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA (LPDG) KABUPATEN LUWU TIMUR	Rp 150.000.000	
6	LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KABUPATEN LUWU TIMUR	Rp 2.300.000.000	
7	RUMAH TAFIDZ QUR'AN AZ-ZAHRA	Rp 200.000.000	
8	SIDANG RAYA XVIII PGI TORAJA SUL-SEL 2024	Rp 150.000.000	
9	BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM (BKMT)	Rp 120.000.000	
10	DEWAN MASJID INDONESIA (DMI)	Rp 240.000.000	
11	MASJID AL-MUHAJIRIN	Rp 150.000.000	
12	MASJID AR-RAHIM	Rp 200.000.000	
13	MASJID JAMI' AT-TAQWA	Rp 250.000.000	
14	AL-MUHAJIRIN	Rp 200.000.000	
15	PURA AGUNG AMERTA SARI	Rp 50.000.000	
16	PURA DALEM BAKAS	Rp 120.000.000	

NO	DETAIL URAIAN PAKET PEKERJAAN KELEMBAGAAN	TOTAL REALISASI	KET
17	PURA PANGERANG TANGKAS KORI AGUNG	Rp 50.000.000	
18	PURA DALEM PENATARAN Ped	Rp 50.000.000	
19	MASJID AL-MUTTAQIN	Rp 150.000.000	
20	PURA TAMAN SARI	Rp 35.000.000	
21	MASJID - QUBA	Rp 50.000.000	
22	GEREJA GPDI JEMAAT YEHOVA RAPHA	Rp 50.000.000	
23	GERJA TORAJA CK.TIRO MATTULILI KLASIS BONE BONE	Rp 50.000.000	
24	GEREJA TORAJA JEMAAT LAUWO BARU KLASIS BONE BONE	Rp 150.000.000	
25	MASJID BABUL JANNAH	Rp 200.000.000,00	
26	GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT ELSADAY TARIPA	Rp 25.000.000	
27	GPIL JEMAAT GLORIA	Rp 35.000.000	
28	MASJID AL-MUTTAQIN	Rp 100.000.000	
29	PURA PANTI GEL GEL	Rp 35.000.000	
30	MASJID AGUNG MALILI	Rp 1.500.000.000	
31	MASJID AR - RAHMAN	Rp 100.000.000	
32	MASJID BABUL ILMI	Rp 900.000.000	
33	MASJID BAITUSSALAM	Rp 300.000.000	
34	MASJID JAMI AL AZHAR	Rp 100.000.000	

NO	DETAIL URAIAN PAKET PEKERJAAN KELEMBAGAAN	TOTAL REALISASI	KET
35	MASJID NURU FALAH	Rp 500.000.000	
36	MASJID NURUL AMIN	Rp 200.000.000	
37	MASJID NURUL MUTTAQIM	Rp 200.000.000	
38	MASJID QUBA	Rp 200.000.000	
39	MASJID RAHMATULLAH	Rp 50.000.000	
40	PURA DALEM PENATARAN PED	Rp 100.000.000	
41	GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA JEMAAT BUKIT ZAITUN MALILI	Rp 200.000.000	
42	GEREJA GPT PETRA JEMAAT TARABBI	Rp 35.000.000	
43	MASJID DARUL AMIN BUMI SAWITA PERMAI	Rp 100.000.000	
44	MASJID NURUL HASAN PERUMAHAN BUMI SAWI PERMAI	Rp 50.000.000	
45	MASJID NURUL ILHAM	Rp 320.000.000	
46	MASJID NURUL UMMAL	Rp 200.000.000	
47	PURA PUSER JAGAT TAMAN BALI LAKAWALI	Rp 45.000.000	
48	MASJID AL-IKHLAS (KODIM)	Rp 200.000.000	
49	GEREJA GKST JEMAAT ELIM MALEKU	Rp 50.000.000	
50	MASJID ABU BAKAR ASH SHIDDIQ	Rp 250.000.000	
51	MASJID IBNU THAIMIAH	Rp 100.000.000	
52	GEREJA KATOLIK PAROKI ST PETRUS MANGKUTANA	Rp 200.000.000	

NO	DETAIL URAIAN PAKET PEKERJAAN KELEMBAGAAN	TOTAL REALISASI	KET
53	GEREJA MASEHI ADVENT HARI KE 7 JEMAAT M. TANA	Rp 150.000.000	
54	GEREJA MASEHI INJIL DI INDONESIA JEMAAT HURMON LOPI	Rp 35.000.000	
55	MASJID AL-HIJRAH	Rp 75.000.000	
56	MASJID AL- FURQAN	Rp 250.000.000	
57	MASJID AL-MUNAWWARAH	Rp 200.000.000	
58	MASJID MIFTAHUSSA'ADAH	Rp 500.000.000	
59	MASJID UMAR BIN KHATAB	Rp 100.000.000	
60	MASJID AL-MUHAJIRIN	Rp 100.000.000	
61	MASJID JABAL SAMAROH	Rp 100.000.000	
62	MASJID AN-NURAIN	Rp 250.000.000	
63	MASJID SYUHADA	Rp 50.000.000	
64	PURA JAGAT NATHA	Rp 100.000.000	
65	WANTILAN PURA TIRTA BHUANA	Rp 50.000.000	
66	MASJID BAITURRAHMAN	Rp 100.000.000	
67	PURA KHAYANGAN TIGA	Rp 50.000.000	
68	PURA DALEM PENATARAN	Rp 50.000.000	
69	GEREJA GPIL JEMAAT LANGKEA RAYA	Rp 350.000.000	
70	GEREJA TORAJA JEMAAT BETESDA TOWUTI	Rp 500.000.000	

NO	DETAIL URAIAN PAKET PEKERJAAN KELEMBAGAAN	TOTAL REALISASI	KET
71	MASJID AL-KAUSAR	Rp 1.000.000.000	
72	MASJID AL-AMAL GRIYA ALAM TOWUTI WAWONDULA	Rp 160.000.000	
73	MASJID AL-FATIH	Rp 200.000.000	
74	GEREJA BETHEL INDONESIA(GBI) JEMAAT WAWONDULA	Rp 180.000.000	
75	GEREJA KIBAIJ JEMAAT WAWONDULA	Rp 180.000.000	
76	GEREJA POUK JEMAAT WAWONDULA	Rp 200.000.000	
77	GEREJA SIDANG JEMAAT ALLAH (GSJA) "SHALLOM" PALUMBA	Rp 100.000.000	
78	GEREJA KRISTEN MARANATA INDONESIA (GKMI) SIDANG JEMAAT WAWONDULA	Rp 100.000.000	
79	MASJID AL-MADINAH NINDA KENZU	Rp 80.000.000	
80	MASJID JAMI RAHMATULLAH	Rp 120.000.000	
81	DEWAN KEMAKMURAN MASJID BESAR AT-TAQWA	Rp 100.000.000	
82	GEREJA ERINE TOGO KLASIS MALILI - NUHA	Rp 30.000.000	
83	GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) JEMAAT URAKO LEDU LEDU	Rp 35.000.000	
84	GEREJA BETHEL TEBERNAKEL (GBT) JEMAAT KASIH KARUNIA	Rp 100.000.000	
85	GEREJA GPIL JEMAAT BUKIT SION TABARANO	Rp 100.000.000	
86	GPIL JEMAAT MAHANAIN KAWATA CABANG KEBAKTIAN SANGGA LEA	Rp 50.000.000	
87	GEREJA POUK JEMAAT WASUPONDA	Rp 280.000.000	
88	GERJA SAHABAT DI INDONESIA JEMAAT SILO WASOPONDA	Rp 50.000.000	

NO	DETAIL URAIAN PAKET PEKERJAAN KELEMBAGAAN	TOTAL REALISASI	KET
89	MASJID BABUL JANNAH	Rp 150.000.000	
90	DEWAN KEMAKMURAN MASJID NURUL HIDAYAH SUMALI	Rp 70.000.000	
91	MASJID BESAR RUHAMA	Rp 250.000.000	
92	GEREJA TORAJA JEMAAT KORANTI	Rp 100.000.000	
93	MASJID AL MUJAHIDIN	Rp 150.000.000	
94	MASJID DARUSSALAM	Rp 100.000.000	
95	MASJID NURUL FALAH	Rp 100.000.000	
96	MASJID NURUL HUDA	Rp 50.000.000	
97	MASJID NURUL IMAN	Rp 150.000.000	
98	PURA AGUNG PITA GIRI	Rp 75.000.000	
99	GEREJA CABANG KEBAKTIAN KANDANG DOMBA JEMAAT HOSANA KAYU TANDUK	Rp 25.000.000	
100	GKST. JEMAAT SION LANDANGI	Rp 100.000.000	
101	GEREJA GPIL JEMAAT LANDANGI	Rp 50.000.000	
102	GEREJA KATOLIK STASI PUSAT PAROKI MARIA IMMACULATA SOROWAKO	Rp 100.000.000	
103	GEREJA SIDANG JEMAAT ALLAH (GSJA) "NEHEMIA" SOROWAKO	Rp 100.000.000	
Grand Total		19.855.000.000	

D. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp(17.325.351.136,84) ditambah Defisit-LO sebesar Rp(69.514.732.881,46), ditambah RKPPD Rp70.883.363.335,96 ditambah dengan Lain- Lain sebesar Rp5.002.427.549,07,- sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp(10.954.293.133,27) sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

TABEL 5.14
DAFTAR PERUBAHAN EKUITAS

URAIAN	2024	2023
Ekuitas Awal	(17.325.351.136,84)	59.151.482.472,19
Surplus/defisit – LO	(69.514.732.881,46)	(77.591.095.900,95)
Koreksi ekuitas Lainnya	0	1.114.262.291,92
Kewajiban untuk di Konsolidasikan	0	0
Lain-lain	5.002.427.549,07	
Ekuitas Akhir	(10.954.293.133,27)	(17.325.351.136,84)

BAB VI

PENUTUP

Demikian penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 ini dibuat agar dapat menjadi informasi bagi masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pemerintah dan lain-lain. Semoga dapat dipahami secara luas tanpa terkecuali. Catatan Atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Malili, Maret 2025

PENGGUNA ANGGARAN,



Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat: Pembina Utama Madya

NIP : 19660620 198603 1 007